

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks dan multidimensional yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

Penduduk miskin di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan, dengan karakteristik dan faktor penyebab yang beragam. Kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum untuk makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi untuk hidup layak.(BPS, 2024)

Dinamika kemiskinan di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif dalam dua dekade terakhir. Krisis ekonomi pada tahun 2008-2024 menyebabkan lonjakan dramatis jumlah penduduk miskin, yang kemudian secara bertahap

menurun seiring dengan pemulihan ekonomi. Namun, penurunan angka kemiskinan cenderung lambat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa kelompok penduduk yang masih berada dalam kemiskinan saat ini merupakan kelompok yang lebih sulit dijangkau oleh intervensi kebijakan konvensional. Ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terfokus untuk mengatasi kemiskinan kronis.

Karakteristik penduduk miskin di Indonesia mencakup berbagai dimensi kerentanan. Secara geografis, kemiskinan lebih terkonsentrasi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, meskipun urbanisasi telah menggeser sebagian masalah kemiskinan di wilayah perkotaan dalam bentuk kemiskinan urban. Dari segi mata pencaharian, penduduk miskin sebagian besar bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah dan tidak stabil, termasuk petani kecil, nelayan, dan pekerja kasar. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi ciri umum penduduk miskin, yang membatasi akses mereka ke pekerjaan formal dengan penghasilan yang lebih baik (World Bank, 2023).

Kesenjangan akses terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan infrastruktur masih menjadi tantangan bagi penduduk miskin. Keterbatasan akses ini tidak hanya memperparah kondisi kemiskinan saat ini tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa putus sekolah untuk membantu mencari nafkah, sehingga kesempatan mereka untuk keluar dari kemiskinan di masa depan menjadi terbatas (Kompasiana, 2023).

Gambar 1.1**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Periode 2008-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Data penduduk miskin Indonesia menunjukkan permasalahan struktural yang kompleks meskipun mengalami tren penurunan jangka panjang. Angka kemiskinan 34,96 juta jiwa pada 2008 merupakan puncak kompleksitas struktural yang disebabkan oleh beban "kemiskinan warisan" krisis 1997-1998 yang belum teratasi. Situasi ini diperparah ketika krisis finansial global menciptakan perfect storm: capital flight USD 3,7 miliar, depresiasi rupiah 23%, dan inflasi 11,06% yang menghancurkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut semakin buruk mengingat struktur ekonomi didominasi sektor informal (70% tenaga kerja) dengan sistem perlindungan sosial yang masih ad-hoc dan tidak terintegrasi.

Namun demikian, periode 2009-2012 menunjukkan pemulihan konsisten dengan penurunan kemiskinan dari 32,53 juta menjadi 28,86 juta jiwa melalui implementasi "triple track strategy" yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan secara simultan

(Bappenas, 2010). Program Keluarga Harapan (PKH) mulai memberikan dampak signifikan dengan meningkatkan partisipasi sekolah 15% dan akses kesehatan 23%. Stabilitas politik pasca-2009 dan reformasi birokrasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2% dengan penurunan pengangguran dari 8,14% menjadi 6,14%.

Meski demikian, periode 2013-2016 mengalami stagnasi di kisaran 27-28 juta jiwa yang menunjukkan fenomena "kemiskinan persisten" dimana 60% kemiskinan yang tersisa bersifat chronic poverty. Perlambatan ekonomi global dan reformasi subsidi BBM 2014, meskipun mengalokasikan ulang Rp 230 triliun untuk infrastruktur dan program sosial, menimbulkan adjustment cost berupa inflasi temporer. Periode ini juga menandai transisi demografi kemiskinan dari rural ke urban, dimana 45% penduduk miskin kini berada di perkotaan, menciptakan kompleksitas baru berupa informal settlement dan ketimpangan akses layanan dasar.

Sebaliknya, periode 2017-2019 menjadi golden period dengan pencapaian angka terendah 24,79 juta jiwa melalui konvergensi optimal pertumbuhan inklusif, inovasi kebijakan sosial, dan stabilitas politik (BPS, 2024) PKH diperluas menjadi 10 juta keluarga dengan peningkatan bantuan 25%, sementara implementasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat menciptakan ekosistem perlindungan sosial komprehensif. Revolusi digital memungkinkan targeting presisi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengurangi kesalahan targeting hingga 15%, serta pembangunan infrastruktur digital yang mencapai 83% wilayah Indonesia membuka akses ekonomi digital bagi UMKM.

Akan tetapi, tahun 2020 mengalami disruption dengan lonjakan kemiskinan menjadi 26,42 juta jiwa akibat pandemi COVID-19 yang menciptakan "kemiskinan kontemporer" dengan karakteristik berbeda (BPS, 2020) Sebanyak 40% kemiskinan baru berasal dari kelas menengah terdampak lockdown, dengan 70% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 50%. Dimensi multidimensional kemiskinan menjadi kompleks: learning loss, akses kesehatan terbatas, dan digital divide yang memperburuk ketimpangan, meskipun bantuan sosial darurat mencapai 30 juta keluarga.

Akhirnya, menurut (BPS, 2024) periode 2021-2024 menunjukkan pemulihan gradual menjadi 25,22 juta jiwa namun mencerminkan "recovery paradox" dimana pemulihan ekonomi tidak sepenuhnya ditransmisikan menjadi pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan akselerasi digitalisasi yang menciptakan skill-biased technological change menguntungkan tenaga kerja terdidik namun memarginalisasi pekerja low-skill. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 695 triliun berhasil mencegah resesi lebih dalam, namun manfaatnya tidak merata karena sektor formal pulih lebih cepat dibandingkan UMKM dan sektor informal (World Bank, 2024)

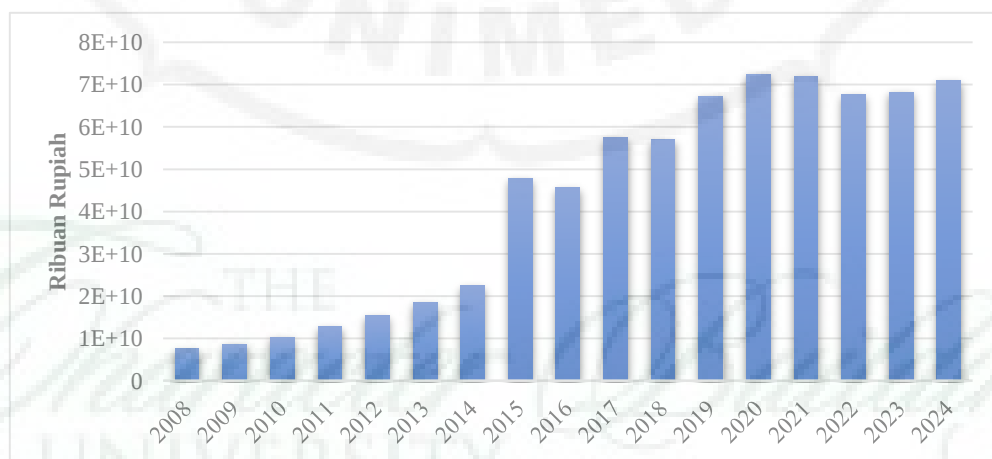
Secara keseluruhan, fluktuasi kemiskinan Indonesia 2008-2024 mencerminkan journey transformasi menuju middle-income country dengan tantangan yang terus berevolusi. Puncak kemiskinan 2008 menunjukkan fragility sistem, sementara pencapaian 2019 membuktikan kapasitas negara dalam pengentasan kemiskinan. Pandemi 2020-2024 mengajarkan pentingnya sistem

perlindungan sosial yang resilient dan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk menghadapi guncangan masa depan.

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dari pendekatan yang berfokus pada penyediaan bantuan langsung tunai, pemerintah telah beralih ke strategi yang lebih komprehensif yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan layanan publik. Dana Desa, yang diluncurkan pada tahun 2015, merupakan salah satu inisiatif penting yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (KPPN, 2023).

Gambar 1.2

Jumlah Dana Desa Di Indonesia Periode 2008-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Keuangan (diolah)

Data dana desa Indonesia memperlihatkan dinamika besar dalam konsistensi dan efektivitas alokasi anggaran 2008–2024. Pada awalnya, dana desa

masih rendah, yakni Rp 7,63 triliun pada 2008 karena dampak krisis global, lalu meningkat bertahap hingga Rp 15,29 triliun pada 2012 seiring kesadaran pemerintah akan pentingnya pembangunan desa untuk mengurangi kemiskinan.

Lonjakan signifikan terjadi pada 2015, ketika dana desa naik dari Rp 18,52 triliun (2013) menjadi Rp 47,83 triliun akibat lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan komitmen Presiden Jokowi membangun desa melalui program Nawacita (Kementerian Keuangan, 2020) . Periode 2017–2019 relatif stabil di kisaran Rp 57–67 triliun, dengan fokus pada efektivitas penggunaan dana serta digitalisasi sistem keuangan desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

Tahun 2020, dana desa melonjak ke Rp 72,42 triliun karena pandemi COVID-19, dimana penggunaannya dialihkan ke bantuan tunai, pangan, dan program padat karya (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2020). Setelah pandemi mereda, alokasi kembali stabil di kisaran Rp 67–71 triliun. Secara keseluruhan, naik-turunnya dana desa mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap krisis, reformasi kebijakan, dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Secara teoritis, Dana Desa diprediksi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui Teori Multiplier Effect Pembangunan Desa (Todaro, M. P., & Smith, 2020) menjelaskan efek pengganda injeksi dana dalam ekonomi lokal jangka pendek, dan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates) yang menekankan efisiensi alokasi sumber daya serta responsivitas pemerintahan lokal dalam jangka panjang. Namun, temuan empiris menunjukkan inkonsistensi signifikan dimana beberapa

penelitian seperti (Halulunga & Bachmid, 2024; Muliza, 2022) mengkonfirmasi validitas kedua teori tersebut dengan menemukan pengaruh signifikan Dana Desa terhadap pengurangan kemiskinan, sementara penelitian (Harirah, 2020; Tarmizi & Miksalmina., 2020) justru menemukan hasil bertentangan yang menunjukkan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan baik jangka pendek maupun panjang, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan validitas teori yang mendasarinya.

Kemiskinan juga tidak terlepas dari aspek tata kelola dan kualitas demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia mencerminkan sejauh mana warga negara, termasuk penduduk miskin, dapat berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Partisipasi yang inklusif dalam proses demokrasi dapat memastikan bahwa kepentingan penduduk miskin terwakili dalam kebijakan pembangunan. Namun, dalam prakteknya, penduduk miskin seringkali menghadapi hambatan struktural dan kultural untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi, sehingga suara dan kepentingan mereka kurang terwakili dalam proses kebijakan (Yudi Wahyudin, 2018).

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan perjalanan yang penuh dinamika sejak 2008. Pada awalnya, IDI berada di angka 67 dan naik tipis ke 67,3 pada 2009. Namun, tahun 2010 terjadi penurunan tajam menjadi 63,17, yang banyak dipengaruhi oleh menurunnya aspek kebebasan sipil serta meningkatnya pembatasan terhadap aktivitas politik warga. Periode 2011–2013

pun tidak stabil, dengan angka yang naik-turun antara 62–65, menandakan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia belum kokoh. Meski demikian, pada 2014 terjadi lonjakan besar mencapai 73,04, dipicu oleh pemilihan umum yang relatif partisipatif dan meningkatnya keterbukaan ruang publik

Gambar 1.3

Tingkat Indeks Demokrasi Indonesia Periode 2008-2024



Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah)

Memasuki 2015–2016, IDI kembali fluktuatif di kisaran 70–72 karena meskipun partisipasi politik masih terjaga, muncul persoalan serius dalam penegakan hukum dan praktik politik uang. Pada periode 2017–2022, tren demokrasi Indonesia tampak lebih baik dengan capaian puncak 80,41 pada 2022. Kenaikan ini erat kaitannya dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatnya transparansi kebijakan, serta berkembangnya kebebasan berorganisasi. Namun, pencapaian tersebut mulai melemah pada 2023 dengan turunnya indeks menjadi 79,51 akibat munculnya regulasi yang dianggap membatasi kritik terhadap pemerintah.

Penurunan drastis ke angka 64,44 pada 2024 menjadi indikasi jelas adanya krisis demokrasi. Penyebab utamanya adalah meningkatnya praktik pembatasan kebebasan berpendapat, baik melalui tekanan terhadap media maupun kriminalisasi aktivis, yang berakibat langsung pada turunnya skor kebebasan sipil (Freedom House, 2024). Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan maraknya politik transaksional dalam proses politik membuat kualitas demokrasi Indonesia merosot tajam (BPS, 2025). Dengan demikian, naik turunnya IDI dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari dinamika kebijakan pemerintah dan praktik politik yang secara bergantian memperluas atau justru membatasi ruang demokrasi.

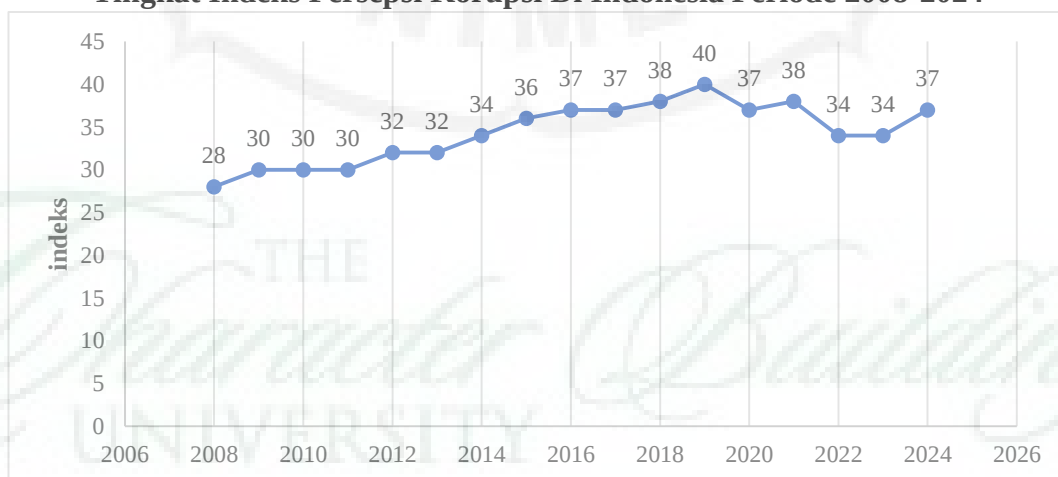
Secara teoritis, Indeks Demokrasi Indonesia diprediksi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui Teori Responsivitas Demokrasi (Przeworski, 2019) yang menjelaskan bagaimana sistem demokratis memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek karena legitimasi politik pemerintah bergantung pada dukungan publik, serta Teori Institutional Inclusiveness (Robinson & Acemoglu, 2012) yang menekankan bahwa institusi demokratis inklusif dengan partisipasi politik luas dan kesetaraan kesempatan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. Namun, temuan empiris menunjukkan inkonsistensi signifikan dimana penelitian oleh (Robbi, 2023; Wulandari & Zulgani, 2024) mengkonfirmasi validitas kedua teori tersebut dengan menemukan pengaruh negatif signifikan Indeks Demokrasi Indonesia terhadap kemiskinan, sementara penelitian Adnan & (Adnan & Amri, 2021; Susanti & Bariyah, 2020) justru menemukan hasil kontradiktif yang menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan baik jangka pendek maupun panjang, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem demokratis sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia dan validitas teori yang mendasarinya.

Korupsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diukur oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, mengurangi kualitas layanan publik, dan menciptakan hambatan birokrasi yang merugikan penduduk miskin. Korupsi juga dapat mendistorsi kebijakan publik sehingga lebih menguntungkan kelompok elit daripada masyarakat luas, termasuk penduduk miskin. (Samputra & Munandar, 2019)

Gambar 1.4

Tingkat Indeks Persepsi Korupsi Di Indonesia Periode 2008-2024



Sumber: Transparency International Indonesia dan Trading Economics

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sejak 2008 hingga 2024 menunjukkan perjalanan yang panjang namun penuh keterlambatan dalam perbaikan. Pada 2008, skor IPK masih berada di angka 28, yang menandakan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Meskipun sempat naik ke 30 pada 2009 dan stagnan hingga 2011, kenaikan yang dicapai belum signifikan. Periode 2012–2019 memperlihatkan tren perbaikan secara bertahap dari 32 menjadi 40, dengan lonjakan paling nyata pada 2014–2016 dari 34 ke 37. Kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh adanya reformasi birokrasi, penguatan lembaga antikorupsi, serta meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.

Namun, capaian positif tersebut tidak berlanjut konsisten. Pada 2020, IPK menurun menjadi 37, yang sebagian besar diakibatkan melemahnya independensi lembaga penegak hukum dan maraknya praktik politik transaksional. Tahun 2021 hanya memperlihatkan sedikit perbaikan menjadi 38, tetapi kemudian terjadi penurunan lebih tajam pada 2022–2023 hingga angka 34. Penurunan ini erat kaitannya dengan revisi regulasi yang dinilai melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga berdampak langsung pada efektivitas pemberantasan korupsi (Transparency International, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang tidak konsisten dapat memicu penurunan persepsi publik terhadap komitmen anti korupsi pemerintah.

Pada 2024, IPK Indonesia naik kembali ke angka 37, namun tetap belum mampu mengembalikan tren positif sebelumnya. Peningkatan kecil ini lebih disebabkan oleh dorongan partisipasi masyarakat sipil dan upaya kolaborasi antar lembaga, meski masih terbatas efeknya. Secara keseluruhan, dalam kurun 16

tahun skor IPK hanya naik 32% dari posisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia bersifat struktural dan sistemik, karena setiap kali terjadi pelemahan dalam aspek regulasi atau independensi institusi antikorupsi, indeks cenderung turun, sementara kenaikannya hanya terjadi ketika ada komitmen nyata dalam reformasi tata kelola pemerintahan (ACLC KPK, 2022). Dengan demikian, lambatnya perbaikan IPK mencerminkan tarik ulur antara upaya pemberantasan korupsi dan kepentingan politik yang mendominasinya.

Secara teoritis, Indeks Persepsi Korupsi diprediksi berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui Teori Capture Effect (Bardhan & Mookherjee, 2016) yang menjelaskan bagaimana korupsi menciptakan mekanisme "penangkapan" sumber daya publik dan program pemerintah oleh kelompok tertentu sehingga bantuan tidak sampai kepada masyarakat miskin yang seharusnya dalam jangka pendek, serta Teori Lingkaran Setan Korupsi dan Kemiskinan (Mauro, 1998) yang menekankan hubungan kausal saling memperkuat antara korupsi dan kemiskinan dalam jangka panjang dimana korupsi menghambat investasi, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi publik. Namun, temuan empiris menunjukkan inkonsistensi signifikan dimana penelitian (Hartin, 2023; Huda, 2022) mengkonfirmasi validitas kedua teori tersebut dengan menemukan pengaruh positif signifikan Indeks Persepsi Korupsi terhadap kemiskinan, sementara penelitian lain bahkan dari peneliti yang sama seperti Khairudin et al. (2021) justru menemukan hasil kontradiktif yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik jangka pendek maupun panjang, sehingga

menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi metodologi dan kondisi spesifik yang mempengaruhi hubungan korupsi-kemiskinan.

Dengan mengkaji secara mendalam ketiga variabel pembangunan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dinamika dan pola hubungan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis komprehensif terhadap fluktuasi dana desa, pergerakan indeks demokrasi Indonesia, serta perkembangan indeks persepsi korupsi akan memberikan gambaran tentang bagaimana faktor-faktor fundamental pembangunan ini berinteraksi dan berdampak pada jumlah penduduk miskin dalam negeri. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan sistemik dalam membentuk lingkungan pembangunan yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Kesenjangan pemahaman yang masih terdapat dalam literatur pembangunan mengenai hubungan kausalitas dan mekanisme transmisi dari ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan menunjukkan pentingnya penelitian empiris yang komprehensif. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan judul **"ANALISIS PENGARUH DANA DESA, INDEKS DEMOKRASI INDONESIA, DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA"**

1.2 Identifikasi Masalah

Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2008–2024 menunjukkan dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks hubungan antara dana desa,

indeks demokrasi Indonesia, dan indeks persepsi korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

1. Ketidakstabilan Sistem Pengentasan Kemiskinan dalam Jangka Panjang Lonjakan kemiskinan 4,6% pada 2020 meski tren turun 27,8% (2008-2024) menunjukkan kerentanan struktural sistem pengentasan kemiskinan terhadap guncangan ekonomi.
2. Inkonsistensi Kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan Fluktuasi dana desa yang ekstrem dan penurunan saat pandemi mengindikasikan lemahnya perencanaan jangka panjang yang menghambat efektivitas pembangunan desa berkelanjutan.
3. Kemunduran Kualitas Demokrasi sebagai Ancaman Stabilitas Politik Jangka Panjang Penurunan drastis Indeks Demokrasi dari 80,41 ke 64,44 (2022-2024) menunjukkan percepatan demokratisasi yang mengancam stabilitas politik jangka panjang.
4. Stagnasi Pemberantasan Korupsi sebagai Penghambat Good Governance Jangka Panjang Indeks Persepsi Korupsi hanya naik 32% dalam 16 tahun (28 ke 37) menunjukkan stagnasi pemberantasan korupsi yang menghambat good governance.
5. Ketidaksinergisan Antar-Indikator Pembangunan dalam Mencapai SDGs Perbaikan kemiskinan tidak diikuti perbaikan demokrasi dan anti-korupsi mengindikasikan lemahnya sinergi antar-kebijakan pembangunan berkelanjutan.

6. Lemahnya Ketahanan Pembangunan terhadap Guncangan Eksternal Kerentanan seluruh indikator pembangunan terhadap pandemi COVID-19 menunjukkan lemahnya sistem ketahanan pembangunan nasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah langkah penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan fokus kajian pada aspek-aspek tertentu. Adapun batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Lingkup geografis penelitian dibatasi pada negara Indonesia.
2. Periode observasi mencakup rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2024.
3. Variabel independen yang diteliti dibatasi pada tiga faktor: Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Indeks Persepsi korupsi.
4. Analisis menggunakan pendekatan *error correction model* untuk mengevaluasi hubungan antar variabel baik jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah Indeks Demokrasi Indonesia memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah Indeks Persepsi Korupsi memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang?

4. Apakah Dana Desa, Indeks demokrasi Indonesia, dan Indeks persepsi Korupsi secara simultan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
3. Untuk Mengetahui pengaruh Indeks Persepsi Korupsi memiliki pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa, Indeks demokrasi Indonesia, dan Indeks persepsi Korupsi secara simultan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, kepada berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memahami pengaruh dana desa, tingkat demokrasi, dan persepsi terhadap korupsi, pemerintah dapat mengevaluasi dan

menyempurnakan kebijakan distribusi anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ekonomi pembangunan dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks hubungan antara variabel fiskal, institusional, dan sosial dengan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan model analisis yang relevan dalam studi-studi serupa.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam pemanfaatan dana desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pijakan awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai isu kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain atau memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif